

Implementation covid-19 vaccination program by Provincial Health Department Bali

Implementasi Program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Putu Sri Armayani¹, Ni Putu Widya Astuti^{2*}, Made Nyandra³

^{1,2,3}Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: widyaastuti@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords:

*Covid-19, Vaccine,
Provincial Health
Department Bali.*

Abstract

Vaccination is a process of administering vaccine in the someone's body so as to be invulnerable. The purpose of this research is to find out the covid-19 vaccination program conducted by provincial health department Bali. The research is descriptive research. Research strategy exploration research is used to put, process, output. The research sample is divided into three of which is the key informants, main informants, and supporting informants. The result showed input from the aspect of this study is the availability of energy in helping covid-19 policy, implementation infrastructure is adequate, the budget charged through national and regional budgets. From the aspect of the process in terms of writing and reporting covid-19 case. From the aspect of output reflected in the amount of vaccination, the reception of vaccine, and the number of target. Local governments in this village officials to give regulations involving areas which was not reached target vaccine.

Kata kunci:

*Covid-19, Vaksin,
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali*

Abstrak

Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin dalam tubuh sehingga menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan penelitian adalah eksplorasi terhadap input, proses, output. Sampel penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek input yakni meliputi ketersediaan tenaga dalam membantu pelaksanaan kebijakan Covid-19, sarana prasarana sudah cukup memadai, kebutuhan anggaran dibebankan melalui APBN dan APBD. Dari aspek proses dilihat dari pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19. Dari aspek output dilihat dari jumlah vaksinasi, penerimaan vaksin, dan jumlah sasaran. Pemerintah daerah dalam hal ini perangkat desa agar memberikan regulasi yang menyangkut daerah-daerah yang belum mencapai target vaksin.

PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases (COVID-19) merupakan jenis varian virus baru yang mudah menyebar serta menginfeksi orang lain. COVID-19 disebabkan infeksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) Virus ini menyebabkan timbulnya gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan pada kasus berat pneumonia, gagal ginjal hingga kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, terdapat dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang yang jumlahnya terus bertambah. Indonesia menerapkan protokol kesehatan di ranah pelayanan publik dengan melaksanakan kegiatan secara *contactless* atau melakukan kontak seminimal mungkin dengan orang lain. Sejak adanya kasus COVID-19 di Provinsi Bali, fokus Pemerintah Provinsi tidak hanya kepada upaya penanggulangan penyakitnya tetapi juga pada upaya pemulihan ekonomi. Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata, sehingga perlu adanya protokol kesehatan yang diterapkan di Bandara Ngurah Rai baik saat keberangkatan maupun kedatangan guna mencegah COVID-19. Selain memberlakukan protokol kesehatan, vaksinasi juga dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan virus COVID-19. Vaksinasi telah dilakukan diberbagai negara, termasuk Indonesia (Valerisha & Putra, 2020).

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga saat terpapar penyakit hanya akan mengalami gejala ringan karena sudah kebal atau terlindungi (Fitriani Pramita Gurning *et al.*, 2021). Vaksinasi diupayakan sebagai solusi menanggulangi pandemi. Skema vaksinasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin mengatur enam jenis vaksin yang akan digunakan, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech dan vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Kementrian Kesehatan melaporkan capaian vaksinasi telah mencapai 280 juta dosis. Hal ini membawa Indonesia menjadi peringkat keempat dunia dari sisi jumlah rakyat yang telah mendapatkan vaksin (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Dinas Kesehatan Provinsi Bali merilis laporan vaksinasi COVID-19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu 102,56% vaksin I, 91,06% vaksin II, dan 109,50% vaksin III (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021).

Pelaksanaan vaksinasi diawali dengan petugas vaksinator melakukan registrasi awal calon penerima vaksin melalui aplikasi *PCare* atau *Primary Care* melalui alamat <https://pcsre.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin> pada komputer/laptop/handphone yang terkoneksi internet yang memadai. Data yang diinput meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal layanan vaksinasi, kapasitas layanan per-sesi, nama dan nomor handphone. Proses registrasi data akan menghasilkan nomor tiket bagi sasaran vaksin sebagai bukti telah terdaftar sebagai penerima vaksin. Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan harus segera mengurus NIK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebelum proses *entry* data sebagai sasaran penerima vaksin (Kementerian Kesehatan *et al.*, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, didapatkan beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya terdapat data NIK yang tidak terbaca oleh aplikasi *P-Care* sehingga terjadi kendala di proses penginputan, tidak adanya jaringan internet pada lokasi pelaksanaan vaksinasi serta minimnya sarana prasarana sehingga proses vaksinasi menjadi tidak optimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin untuk mengevaluasi bagaimana Implementasi Vaksinasi COVID -19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan di mulai bulan Desember 2021 hingga Juni 2022. Strategi penelitian yang digunakan penelitian adalah eksplorasi terhadap input, proses, output. Sampel penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Instrumen penelitian ini menggunakan dokumentasi dan pedoman wawancara sebagai pedoman pengumpulan data berupa lembaran atau catatan. Analisa data yang digunakan untuk menganalisis yaitu mentranskripsikan hasil wawancara mendalam, mencari pola dan hubungan berdasarkan hasil temuan wawancara, dan menarik kesimpulan serta interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang dengan karakteristik sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Karakteristik Informan

Kode Informan	Jenis Kelamin	Status/Jabatan
1	L	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2	P	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3	P	Tim Vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4	P	Tim Vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Bali
5	P	Tim Vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6	L	Tim Vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7	P	Masyarakat
8	L	Masyarakat
9	P	Masyarakat
10	L	Masyarakat
11	L	Masyarakat
12	P	Masyarakat
13	P	Masyarakat
14	L	Masyarakat
15	P	Masyarakat
16	P	Masyarakat

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan informasi bahwa mayoritas informan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 10 orang sedangkan laki-laki sebanyak 6 orang.

Aspek Input Implementasi Program Vaksinasi oleh Dinas Kesehatan provinsi Bali

Tim Vaksinator

Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 melibatkan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut sebagai tim vaksinator. Sumber daya yang dimaksud yakni meliputi ketersediaan personal atau tenaga kerja di bidang kesehatan yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan Covid-19.

"Dengan pembentukan tim untuk mempercepat capaian target vaksin" (informan 1)

"Jumlah anggota tim vaksinator yaitu 1 tim sebanyak 6 orang. Tahun 2021 tim vaksinator mencapai 20an tim, namun saat ini sudah dikerucutkan menjadi 9 tim." (informan 2)

"Tim dibagi menjadi empat bagian yaitu registrasi, skrining, vaksin (suntik), observasi" (informan 4)

Dalam mengoptimalkan target vaksinasi, tim vaksinasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dibagi menjadi beberapa tim dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam mengoptimalkan capaian target vaksinasi diperlukan penambahan tenaga kesehatan atau vaksinator mengingat semakin besarnya target kelompok sasaran atau penerima vaksin Covid-19

"Mekanisme kerja tim vaksinator dalam mengoptimalkan target dapat dilakukan dengan cara menambah tim vaksinasi" (informan 2)

"Tim dibagi menjadi beberapa kelompok dan turun lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan" (informan 3)

"Tim turun ke lapangan sesuai jadwal" (informan 5)

Sarana Prasarana

Secara umum, sebagian besar informan mengatakan bahwa sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah memadai. Walaupun sebagian besar informan menyatakan sarana prasarana vaksinasi Covid-19 sudah memadai, namun ada informan yang berpendapat sebaliknya, Informan berpendapat belum memadai dalam ketersediaan alat tensi sehingga tim vaksinator menyediakan alat tensi pribadi. Selain itu ketersediaan fasilitas wifi juga tidak memadai sehingga proses input identitas peserta yang dominan dilakukan dengan sistem daring menjadi terhambat. Hal ini membuat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi kurang efisien akibat waktu yang diperlukan untuk melakukan pencatatan memakan waktu yang lebih lama.

"Sarana dan prasarana vaksinasi Covid-19 belum memadai. Kadang-kadang kekurangan tensi, koneksi wifi tidak memadai sehingga proses input identitas peserta menjadi terhambat, APD kurang memadai dan tidak sesuai SOP" (informan 6)

"sarana dan prasarana cukup memadai" (informan 5)

"sarana dan prasarana memadai, namun biasanya kekurangan alat tensi sehingga tim vaksin yang membawa tensi pribadi" (informan 3)

Anggaran Vaksinasi

Kebutuhan anggaran dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dibebankan melalui APBN dan APBD dengan jumlah yang relatif besar dan signifikan sehingga pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan realokasi dan/atau pemotongan anggaran belanja dari kementerian/lembaga. Kebutuhan logistik utama seperti vaksin, alat suntik, *safety box* anggarannya bersumber dari APBN dan logistik penunjang seperti masker, APD anggarannya berasal dari APBD.

“Logistik seperti vaksin, alat suntik, safety box bersumber dari pusat dan logistic penunjang seperti masker, APD berasal dari APBD” (informan 1)

Aspek Proses Implementasi Program Vaksinasi oleh Dinas Kesehatan provinsi Bali

Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 3 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Prosedur pelaksanaan vaksinasi terbagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 terlaksana sejak Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang. Tahap kedua terlaksana sejak minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas yaitu kelompok usia lanjut dan petugas pelayanan publik. Tahap ketiga dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas. Selain kelompok prioritas dilakukan juga vaksinasi pada tahap I dan tahap II yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2021.” (informan 1)

Vaksinasi Covid-19 telah dilaksanakan sejak Januari 2021 dan diharapkan dapat menjangkau seluruh target sasaran secara bertahap. Agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar dengan cakupan yang tinggi, maka diperlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Informan yang berasal dari masyarakat berpendapat bahwa mendapat informasi dari kantor tempat kerja dan sosial media.

“Selama ini hanya mendapat informasi dari kantor tempat kerja” (Informan 16)

“Saya tahu dari sosial media” (Informan 15)

Informan masyarakat berpendapat motivasi mengikuti vaksinasi Covid-19 diantaranya untuk kesehatan diri dan keluarga, mencegah terpaparnya virus, meminimalisir gejala yang ditimbulkan Covid-19, dan dapat mencapai herd immunity.

“Kesehatan diri dan keluarga” (informan 14)

“Mencegah terpaparnya virus Covid-19 dan meminimalisir gejala yang diakibatkan oleh virus Covid-19” (Informan 12)

“Adapun motivasi saya antara lain manfaatnya dapat mengurangi dampak berat dari virus serta dapat mencapainya herd immunity” (Informan 7)

Pencatatan dan Pelaporan

Informan menyatakan pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 dilakukan dengan menggunakan aplikasi P-Care. Laporan yang telah tercatat dalam aplikasi P-Care disampaikan secara berkelanjutan kepada pemerintah pusat. Penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan pelacakan menjadi penting dalam menentukan kebijakan yang dibuat.

“Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program menggunakan aplikasi P-care. Perihal pelaporan pengambilan data disistem dengan target pelaporan untuk WHO dalam kurun waktu 3 bulan, rasio, dan untuk Satgas Covid cek di website” (Informan 1)

“Aplikasi P-Care secara continue dilaporkan ke pusat. Laporan harian diinput melalui aplikasi pcare milik website BPJS. Aplikasi ini di merge oleh KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Setiap kabupaten dan provinsi mempunyai 1 user untuk dapat masuk ke sistem. Update data vaksinasi Covid-19 diambil berdasarkan aplikasi ini.” (Informan 2)

Aspek Output Implementasi Program Vaksinasi oleh Dinas Kesehatan provinsi Bali

Capaian Vaksinasi

Capaian vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh jumlah vaksinasi, penerimaan vaksin, dan jumlah sasaran. Secara umum proses vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali sudah sangat bagus, hanya saja masih ditemukan permasalahan seperti adanya data yang berbeda dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sinkronasi pada data yang berbeda.

“Hingga saat ini capaian sudah sesuai target, namun di beberapa daerah masih terdapat data yang berbeda di lapangan. Perbedaan itu akibat dari beberapa faskes melakukan pencatatan data secara manual. Selain itu beberapa waktu lalu kasus Covid-19 sempat menurun sehingga masyarakat mulai enggan melanjutkan vaksinasi. Dilihat dari tingkat kunjungan masyarakat yang mulai berkurang” (Informan 1)

Hambatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19

Hambatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang ditandai dengan kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

“Kesadaran masyarakat untuk mendapat vaksin belum maksimal” (informan 1)

“Kesadaran masyarakat untuk vaksin kurang” (Informan 2)

“Peserta menolak vaksin yang akan diberikan misal peserta ingin vaksin x tapi tersedia vaksin y, kondisi kesehatan peserta, serta peserta ketakutan saat akan disuntik sehingga memakan waktu lama dan antrian menjadi panjang” (Informan 4)

“Banyak identitas yang tidak sesuai dengan data dukcapil” (Informan 5)

Informan masyarakat menyatakan beberapa hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diantaranya kuota harian vaksinasi terbatas dan aplikasi error saat proses pendaftaran sehingga terjadi keterlambatan proses pendaftaran.

“Tidak, selama proses pendaftaran sampai dapatnya vaksin berjalan lancar” (Informan 7)

“Tidak karena pendaftaran sudah diatur oleh perusahaan” (Informan 8)

“Hambatan dalam proses pendaftaran vaksinasi Covid-19 seperti aplikasinya error dan lambat penanganan petugas di lapangan” (Informan 15)

“Quota harian terbatas” (Informan 16)

Langkah yang diambil untuk menanggulangi kendala dan hambatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yaitu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran.

“Melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapat vaksin” (Informan 1)

Pembahasan

Tim Vaksinator

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bagian dari aspek input dalam program vaksinasi Covid 19. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid 19 adalah tim vaksinator yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjalankan setiap tahapan proses pelaksanaan vaksinasi Covid 19 (Arifin, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat penurunan jumlah tim vaksinator yang mulanya 20 tim di tahun 2021 menjadi 9 tim di tahun 2022. Penurunan jumlah tim vaksinator tentunya akan berdampak terhadap program vaksinasi Covid 19 khususnya dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi Covid 19. Penurunan jumlah tim vaksinator dilakukan karena secara target Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah memiliki capaian vaksinasi yang tinggi. Sejalan dengan Nugroho (2022) yang menyatakan kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya (Nugroho & Irfan, 2022). Dalam hal ini memiliki SDM yang baik dan berkualitas menjadi tombak keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 753/03-B/HK/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang perubahan keempat atas keputusan Gubernur nomor 596/03-B/HK/2021 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan tim Vaksinasi Covid-19 dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19 Provinsi Bali. Perubahan keempat ini mencakup jumlah tim vaksinator yang awalnya berjumlah 20 tim menjadi 9 tim vaksinator (Pemerintah Provinsi Bali, 2021).

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan (Arifin, Syamsul, 2016). Khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sarana dan prasarana yang tersedia meliputi Gudang dan sarana rantai dingin vaksin Covid-19 serta peralatan pendukung dan logistik. Peralatan pendukung dan logistik meliputi *syringe*, alkohol, kapas, alat pelindung diri, tensi meter, termometer, *cold chain*, tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*) dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa sarana dan prasarana vaksinasi Covid-19 belum memadai. Misal terjadi kekurangan alat tensi, koneksi wifi tidak memadai, serta APD kurang memadai. Tentunya apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan meningkatkan risiko terjadinya penularan virus Covid 19 pada peserta ataupun tim vaksinator yang secara langsung akan berdampak pada keberhasilan program vaksinasi Covid 19. Sejalan dengan penelitian Viani (2017) ketersediaan logistik vaksin merupakan bagian dari perencanaan teknis dalam program imunisasi (Viani, 2017). Penelitian Rizki (2020) juga mengemukakan sarana prasarana penting dalam pelaksanaan vaksinasi.

Anggaran Vaksinasi

Menurut Basri (2013) anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun (Basri, 2013). Pembiayaan kesehatan menjadi salah satu faktor utama didalam peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal maupun belanja barang. Didalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap sektor kesehatan dianggarkan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten serta sumber lainnya (Hasibuan, 2020).

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 disebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penggarangan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Dinas Kesehatan Provinsi Bali dibebankan melalui APBN dan APBD yang relatif besar dan signifikan sehingga pemerintah

menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan realokasi dan/atau pemotongan anggaran belanja dari kementerian/lembaga. Pemotongan anggaran belanja dan/atau realokasi ini menyebabkan anggaran untuk program kesehatan lainnya menjadi berkurang. Vaksin, alat suntik, safety box bersumber dari APBN dan logistik penunjang seperti masker, APD berasal dari APBD.

Aspek Proses

Prosedur Pelaksanaan

Vaksinasi Covid-19 telah dilaksanakan sejak Januari 2021. Agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dengan cakupan tinggi, maka perlu dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap 1 dilaksanakan sudah sejak Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas yang terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berusia 18 tahun ke atas. Tahap kedua mulai dilaksanakan pada minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas yang terdiri dari kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun) dan petugas pelayanan publik. Tahap ketiga dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 dengan menyasar kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi (≥ 18 tahun) dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang di vaksinasi pada tahap I dan tahap II. Sejalan dengan penelitian Yuningsih, 2020, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan tahapan vaksinasi Covid-19 diantaranya perlu sosialisasi pentingnya vaksinasi di segala aspek kehidupan, pendekatan kolektif untuk vaksinasi, serta vaksinasi skala besar didukung oleh sumber daya yang kuat. (Yuningsih, R, 2020). Sosialisasi ini dapat dilakukan salah satunya melalui media sosial. Berdasarkan penelitian Pratiwi (2021) media sosial mempengaruhi opini milenial yang menyebabkan sebagian besar responden belum melakukan vaksinasi. Masyarakat memiliki ketakutan dikarenakan berita positif dan negatif yang beredar (Pratiwi et al., 2021).

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan aspek penting dalam suatu proses manajemen. Fungsi utama pencatatan dan pelaporan yaitu sebagai alat monitoring serta evaluasi manajemen surveilans dan penghitung indikator epidemiologi pada kegiatan vaksinasi Covid 19 (Kemenkes RI, 2020).

Kegiatan pencatatan dan pelaporan vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilakukan secara daring menggunakan aplikasi P-care. P-care mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19. Pada aplikasi P-Care dilakukan simplifikasi yang terkoneksi dengan Dinas Dukcapil. Langkah ini merupakan strategi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Direktorat Federal Kependudukan dan Catatan Sipil (Kemenko PMK, 2021). Keuntungan dari menggunakan aplikasi ini tentu dapat memudahkan dalam melakukan pengobatan pasien di fasilitas kesehatan yang dituju seperti alur pendaftaran pasien lebih praktis, data pasien terintegrasi, proses diagnose pasien lebih cepat, proses rujukan lebih mudah, dan pendataan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi menjadi terintegrasi.

Aspek Output

Capaian Vaksinasi

Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid-19 yaitu menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus Covid-19. Pencapaian *herd immunity* di masyarakat merupakan bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang komprehensif, terintegrasi, dan preventif penerapan protocol kesehatan. Capaian vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh jumlah vaksinasi, penerimaan vaksin, dan jumlah sasaran. Angka capaian yang sudah mencapai target juga dipengaruhi oleh pendekatan sosial budaya dalam pelaksanaan vaksinasi karena adanya hubungan antara manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya, sebab keberadaan manusia dalam proses tumbuh dan perkembangannya ada dalam suatu kelompok yang mempunyai aturan, nilai dan norma yang mengikat masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021).

Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan data yang berbeda dari data yang dilaporkan setiap daerah dengan data nyata dilapangan. Perlu adanya sinkronasi untuk data yang berbeda. Menurut survei penerimaan vaksin Covid-19 di Indonesia, keraguan masyarakat muncul akibat takut jarum suntik dan pernah mengalami efek samping setelah divaksinasi. Akibat penurunan kasus Covid-19 beberapa waktu lalu menyebabkan masyarakat enggan untuk melanjutkan vaksinasi. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin Covid-19. Beberapa diantaranya bahkan menolak diberikan vaksin. Rendahnya partisipasi masyarakat ditandai dengan kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Masyarakat menyatakan beberapa hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diantaranya kuota harian vaksinasi terbatas dan aplikasi *error* saat proses pendaftaran sehingga terjadi keterlambatan proses pendaftaran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19 patut diapresiasi, namun pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat lebih optimal. Dalam mengatasi tantangan ini diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kementerian kesehatan juga perlu melibatkan pemerintah daerah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Aspek Keberhasilan Vaksinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Angka capaian cakupan vaksinasi Covid-19 sudah melebihi target. Angka cakupan yang sudah melebihi angka 100% salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan faktor penting. Ada banyak masyarakat menganggap mendalami spiritualitas adalah cara menjaga kesehatan dan menghadapi penyakit. Pendekatan sosial budaya adalah model pendekatan yang menekankan pada nilai sosial dan budaya yang melekat serta berkembang di suatu masyarakat seperti sistem tatanan sosial maupun sistem religi sehingga melalui pendekatan ini didapatkan kesamaan dalam pola pikir, persepsi, keyakinan-keyakinan, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan individu menjalani kehidupan di masyarakat. Dibutuhkan pendekatan socio-cultural (sosial budaya) dalam upaya memberantas penyebaran Covid-19, salah satunya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini penanganan wabah penyakit harus dilakukan dengan pendekatan sosial budaya (Fauzia & Hamdani, 2021).

SIMPULAN

Dari segi input diperlukan penambahan tenaga kesehatan atau vaksinator mengingat semakin besarnya target kelompok sasaran atau penerima vaksin Covid-19. Dari segi proses pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 dilakukan dengan menggunakan aplikasi P-Care dan dari segi output vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali sudah sangat bagus, hanya saja masih ditemukan permasalahan seperti adanya data yang berbeda dilapangan dan menurunnya minat masyarakat. Dibutuhkan pendekatan socio-cultural (sosial budaya) dalam upaya memberantas penyebaran Covid-19, salah satunya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Dhyana Pura, Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah mendukung kami, sehingga kami dapat membuat artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, dkk. (2016). *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*. Pustaka Banua.
- Basri, R. (2013). *Analisis Penyusun Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. 1(13), 202–212.
- Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (2021). *Perkembangan COVID-19*.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 323–338.
- Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43–50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>
- Hasibuan, R. (2020). *Bahan Ajar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Ghalia Indonesia.
- Kemendes RI. (2020). *Penyajian Laporan Harian Covid-19 Melalui Sistem Online Pelaporan Harian Covid-19*. 19(September), 1–7.
- Kemenko PMK. (2021). *Perkuat Akurasi Data, Petugas Wajib Segera Masukkan Penerima Vaksin ke Aplikasi P-Care*.
- Kementerian Kesehatan, R., Handayani, D., Indonesia, H. D., ... F. I., & 2020, U. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021. *Jurnalrespirologi.Org*, 2019(2), 1–4.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020a). *KMK 9860 Tahun 2020* (p. 4).
- Kementerian Kesehatan RI, 2020B. (2020b). *Revisi-05 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)*. 1–214.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Capaian Vaksinasi Covid-19 Indonesia Naik ke Peringkat Empat Dunia*.
- Nugroho, D., & Irfan, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)*. 11(1), 89–103.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021). *Keputusan Gubernur Bali Nomor 753/03-B/HK/2021*.
- Pratiwi, T. S., Insani, P., Fitrianti, L., Sari, C. nur indah, Siburian, N., & Wardi, J. (2021). Pengaruh Media Terhadap Opini Milenial Tentang Vaksinasi. *Seminar Nasional*

Karya Ilmiah Multidisiplin, 1(1), 60–64.

Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 131–137. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>

Viani, K. O. (2017). *Pentingnya Perencanaan dalam Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya The Importance of Planning in Immunization Program at City Health Department of*. 5, 105–110.

